



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,**  
**BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	25 ( <i>dua puluh lima</i> )
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Brantas Adipraya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, dan PT Nindya Karya (Persero).
Hari, Tanggal	:	Senin, 17 Februari 2020
Pukul	:	15.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Perkenalan; 2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan 3. Lain-lain.
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Brantas Adipraya (Persero), Bambang E. Marsono; 3. Direktur Utama PT Istaka Karya (Persero), Sigit Winarto; 4. Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero), Catur Prabowo; 5. Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional, Bambang Triwibowo; dan 6. Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Haedar A. Karim, beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Brantas Adipraya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, dan PT Nindya Karya (Persero) pada pukul 16.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 17 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional untuk lebih fokus pada *core bussiness* masing-masing, sehingga pertumbuhan perusahaan dapat lebih optimal.
2. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional berfungsi sebagai entitas perusahaan yang untung, bertumbuh dan dapat bersaing sehat dengan perusahaan lainnya termasuk swasta.
3. Komisi VI DPR RI melihat adanya tumpang tindih dan ketidakfokusan BUMN Bidang Konstruksi. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menata kembali BUMN yang bergerak di bidang konstruksi agar mampu berdaya saing unggul dan efisien.
4. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional untuk berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), dan pedoman perilaku (*code of conduct*) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Bidang Konstruksi, Sarana dan Prasarana yaitu PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.12 WIB.

Jakarta, 17 Februari 2020  
**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI**  
**KETUA RAPAT,**

TTD.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.**  
**A-352**